



Analisis Kinerja Aparatur Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kenangan Baru

Analysis of Apparatus Performance in the Distribution of the Family Hope Program (PKH) in Kenangan Baru Village

Anjuyto Hutabarat¹, Yurial Arief Lubis² & Agung Suharyanto^{1*}

1) Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan tunai bersyarat dengan sasaran Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparatur pemerintahan dalam penyaluran PKH pada masyarakat miskin di Kelurahan Kenangan Baru dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penyaluran PKH di Kelurahan Tersebut. Penelitian ini berfokus pada kurang optimalnya penyaluran dana PKH dan ketidaktepatan sasaran penerima. Pendekatan teori Mondy, Noe & Premeaux digunakan dengan indikator kuantitas, kualitas, kemandirian, inisiatif, adaptasi, dan kerja sama. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa penyaluran PKH berjalan baik, namun masih terdapat ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan dana. Aparatur belum sepenuhnya mandiri, sementara pendamping PKH menunjukkan inisiatif dan adaptasi yang baik. Namun, koordinasi dengan aparatur kelurahan masih kurang. Hambatan utama meliputi ketidaksinkronan data, rendahnya partisipasi KPM, keterbatasan SDM pendamping, dan dana yang tidak tersalurkan.

Kata Kunci: Kinerja; Aparatur Pemerintah; Masyarakat Miskin.

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is a conditional cash assistance with the target of Very Poor Families (KSM) with the aim of poverty alleviation. This study aims to analyze the performance of government apparatus in distributing PKH to the poor in Kenangan Baru Village and to find out what are the inhibiting factors in the distribution of PKH in the Village. This study focuses on the suboptimal distribution of PKH funds and the inaccuracy of recipient targets. The Mondy, Noe & Premeaux theoretical approach is used with indicators of quantity, quality, independence, initiative, adaptation, and cooperation. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed in a qualitative descriptive manner. This study concludes that the distribution of PKH is going well, but there are still inaccuracies in targets and delays in funding. The apparatus is not yet fully independent, while PKH companions have shown good initiative and adaptation. However, coordination with the village apparatus is still lacking. The main obstacles include data insynchronization, low participation of KPM, limited human resources to accompany them, and undistributed funds.

Keywords: Performance; Government Apparatus; Poor.

How to Cite: Hutabarat, A., Lubis, Y. A., & Suharyanto, A. (2025). Analisis Kinerja Aparatur Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kenangan Baru. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 4(1): 16-22,

*E-mail: agungsuaharyanto@staff.uma.ac.id

ISSN 2828-6537 (Online)



PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan aparatur pemerintahan merupakan alat, orang/pegawai negeri, instansi maupun badan pemerintahan yang mempunyai peran atau tugas untuk melayani sebagai bentuk abdi kepada negara dan abdi kepada masyarakat. Dilihat dari tingkat terendah di pemerintahan yaitu pada kelurahan, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat di Daerah Kabupaten/Daerah Kota di bawah Kecamatan (Matondang, 2015; Sukrianto & Saharuddin, 2021). Kelurahan dipimpin oleh lurah yang statusnya merupakan Pegawai Negeri sipil (PNS), lokasi Kelurahan tepatnya di daerah perkotaan. Tugas dari Kelurahan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah di wilayahnya. Dalam pelaksanaan tugas, lurah dibantu oleh sekretaris daerah beserta perangkat di kelurahan dengan jabatan tertentu.

Jika dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat, kinerja yang optimal dari aparatur pemerintahan merupakan harapan setiap masyarakat terutama pada tingkat terendah yaitu di Kelurahan. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Hakim & Pakam, 2014; Pratama et al., 2022). Kinerja juga dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas tertentu. Penilaian kinerja merupakan proses dimana organisasi berupaya memperoleh informasi yang sangat akurat tentang kinerja para pegawainya (Auza, 2023; Ilmiah et al., 2023). Terdapat 4 syarat untuk mendapatkan kinerja yang optimal yaitu, Kemampuan Sumber Daya Manusia yang layak, Melakukan rekrutmen untuk menarik karyawan yang berkualitas, Melakukan pembinaan yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan Melakukan pengawasan. (Tyson & Jacson, 2010) menyatakan, "meningkatkan kinerja merupakan konsep sederhana tetapi penting. Konsep tersebut didasarkan pada ide bahwa sebuah tim akan meningkat dengan cepat dan terus-menerus dengan cara meninjau keberhasilan serta kegagalannya". Salah satu tugas dan fungsi Kelurahan yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mencapai suatu tujuan pemerintahan. Salah satu tujuan pemerintahan yaitu dalam pengentasan kemiskinan (Mulyana & Zainuddin, 2017; Nindatu, 2019).

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Dalam hal kemiskinan pemerintah meyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial untuk membantu masyarakat dalam melanjutkan hidupnya (S, 2019; Utama et al., 2023). Salah satu bantuan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat dengan sasaran keluarga maupun seseorang yang miskin dan rentan. Keluarga atau seseorang tersebut terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masyarakat tersebut ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan PKH (Kementerian Sosial, 2018). Pada PKH di Indonesia sasaran bantuan adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM). Peserta PKH harus dipastikan mendapat akses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Peserta PKH memiliki kewajiban dibidang kesehatan yaitu melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, Pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita.

Pada bidang pendidikan peserta PKH memastikan kehadiran anggota keluarga ke satuan pendidikan sesuai jenjang pendidikan. Untuk KPM PKH penyandang disabilitas kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya. Program bantuan sosial ini juga diterapkan di Kelurahan Kenangan Baru, Bantuan PKH ini diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan (Mubarq et al., 2023; Sitepu et al., 2019; Virgoreta & Pratiwi, 2015). Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah diimplementasikan, namun demikian hasil belum optimal, ditandai dengan masih adanya masyarakat miskin yang layak mendapat program bantuan tersebut namun tidak menerima jenis bantuan apapun dari pihak pemerintah, ada juga ditemukan yang telah menerima bantuan PKH ini namun terdapat kendala seperti dana bantuan yang belum dicairkan tanpa alasan tertentu, dan juga data-data masyarakat KPM yang tidak sesuai alamat penerima, ini ditemukan melalui penelitian di Kelurahan Kenangan Baru.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini menunjukkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). (Kusnadi, 2020) menemukan bahwa PKH di

Kelurahan Alai belum berjalan sesuai harapan masyarakat. (Junianto et al., 2020) mengidentifikasi kinerja pegawai di Kantor Kelurahan Gelumbang masih kurang baik akibat disiplin rendah dan keterbatasan sarana. (Yusuf Hidayat, Laila Azkia, 2022) mengungkapkan hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Pelambuan yang belum terselesaikan. (SUPRATMAN, 2019) menemukan bahwa PKH di Desa Tapung Lestari berjalan sesuai aturan dengan transparansi dan musyawarah masyarakat. Sementara itu, (Yuhana & Kartini, 2020) menyatakan implementasi PKH di Kelurahan Cigadung masih belum optimal, dengan banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam prosedur pelaksanaan program.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran Pogram Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan untuk mengetahui apa saja hambatan dala penyaluran PKH di Kelurahan Tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian kualitatif mencakup pengumpulan data studi kasus, wawancara serta pengamatan pribadi. Tipe penelitian adalah deskriptif digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan fenomena aktual dan faktual yang terjadi di lapangan,

Melalui metode Kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tulisan, ucapan dan perilaku yang ditemui pada saat pengamatan dari suatu individu, kelompok/komunitas masyarakat dan organisasi dalam konteks tertentu sehingga memberikan pandangan penelitian yang lengkap, komprehensif dan holistik. Penelitian kualitatif umumnya dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsionalisasi organisasi, kegiatan sosial dengan menggunakan prosedur statistik atau cara pengukuran lainnya. Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini maka peneliti dapat menggambarkan bagaimana permasalahan yang berhubungan dengan “Analisis Kinerja aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran PKH Pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Kenangan Baru”.

Dalam penelitian ini, informan berperan penting dalam pengambilan data. Informan adalah individu yang memberikan informasi langsung terkait penelitian. Informan dibagi menjadi tiga: Informan Kunci, yang mengetahui seluruh informasi penelitian (Kepala Lurah Kenangan Baru, Rizal Arifin, S.STP); Informan Utama, yang memahami teknis permasalahan (Pendamping Sosial PKH, Ibu Windasari); dan Informan Tambahan, yang melengkapi analisis (Sekretaris Lurah dan masyarakat penerima PKH seperti Ibu Jojo, Ibu Agus Susanti, dan Ibu Dian Chandra Dewi). Penelitian ini menggunakan analisis data melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Aparatur Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kenangan Baru

Kinerja aparatur pemerintahan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kenangan Baru dapat dianalisis menggunakan teori pengukuran kinerja dari Mondy, Noe, & Premeaux (dalam Priansa, 2014). Teori ini mencakup enam indikator utama, yaitu kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, kemandirian, inisiatif, adaptasi, dan kerja sama. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, analisis terhadap masing-masing indikator akan dibahas lebih lanjut.

1. Kuantitas Pekerjaan

Kuantitas pekerjaan mengacu pada volume pekerjaan yang terselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks penyaluran PKH di Kelurahan Kenangan Baru, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2022 mencapai 40 keluarga, dengan penyaluran dana yang dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya. Aparatur kelurahan bertugas melakukan input data masyarakat yang diajukan sebagai penerima bantuan, sementara pendamping PKH mengkoordinasikan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) untuk memastikan

bahwa penerima bantuan memahami tujuan dan manfaat program. Wawancara dengan informan utama menunjukkan bahwa tugas pendamping PKH mencakup perencanaan kegiatan serta pembentukan kelompok KPM guna memudahkan koordinasi. Secara umum, kuantitas pekerjaan dalam penyaluran PKH telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dengan tahapan penyaluran yang berjalan sesuai jadwal.

2. Kualitas Pekerjaan

Kualitas pekerjaan mengacu pada ketepatan, ketelitian, dan kelengkapan dalam pelaksanaan tugas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan aparatur kelurahan dalam penyaluran PKH masih menghadapi kendala. Salah satu masalah utama adalah tidak tepatnya sasaran penerima bantuan, di mana ditemukan bahwa beberapa penerima PKH memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dan tidak tinggal di alamat yang terdaftar. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam verifikasi data penerima. Selain itu, terdapat laporan dari KPM yang tidak menerima dana bantuan pada tahap tertentu tanpa alasan yang jelas. Kendala ini menandakan bahwa sistem pengawasan terhadap penyaluran PKH perlu diperbaiki agar dana bantuan benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

3. Kemandirian

Kemandirian mengacu pada kemampuan pegawai untuk bekerja tanpa perlu diawasi atau dibantu secara langsung. Dalam konteks penyaluran PKH, aparatur kelurahan diharapkan mampu menangani berbagai tugas, mulai dari pendaftaran hingga sosialisasi kepada masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara umum aparatur di Kelurahan Kenangan Baru telah bekerja dengan cukup mandiri dalam menjalankan tugasnya. Namun, beberapa prosedur administrasi terkadang tertunda karena hanya bisa diselesaikan oleh pegawai tertentu, seperti lurah atau sekretaris kelurahan. Hal ini menyebabkan masyarakat harus menunggu lebih lama dalam proses pengurusan bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemandirian aparatur cukup baik, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan efisien.

4. Inisiatif

Inisiatif mengacu pada kemauan aparatur untuk bertindak tanpa harus menunggu perintah. Dalam penyaluran PKH, inisiatif dapat terlihat dari bagaimana aparatur memberikan layanan kepada masyarakat, baik dalam proses pendaftaran maupun dalam menangani kendala yang dihadapi penerima manfaat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur kelurahan telah berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP). Selain itu, pendamping PKH juga menunjukkan inisiatif dengan mengunjungi rumah KPM yang mengalami kendala dalam pendataan. Pendamping juga aktif dalam memberikan edukasi kepada penerima manfaat mengenai kesehatan, pendidikan, dan keterampilan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif aparatur dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam beberapa aspek seperti respons cepat terhadap keluhan masyarakat.

5. Adaptasi

Adaptasi merujuk pada kemampuan pegawai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan kerja. Dalam konteks penyaluran PKH, aparatur harus mampu menanggapi perubahan kebijakan, sistem kerja, serta dinamika sosial di masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur di Kelurahan Kenangan Baru telah mampu beradaptasi dengan baik dalam menghadapi berbagai perubahan, baik dalam sistem kerja maupun dalam pergantian penerima manfaat. Pendamping PKH juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dalam berinteraksi dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi melalui grup WhatsApp. Kemampuan adaptasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa program PKH tetap berjalan dengan efektif meskipun ada perubahan kebijakan atau kondisi di lapangan.

6. Kerja Sama

Kerja sama mengacu pada kemampuan aparatur untuk berkolaborasi dengan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Dalam penyaluran PKH, kerja sama antara kelurahan dan pendamping PKH menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh

masyarakat dengan tepat. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama antara aparat kelurahan dan pendamping PKH masih belum optimal. Beberapa penerima manfaat melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan penjelasan yang memadai terkait kendala dalam pencairan dana. Selain itu, komunikasi antara kelurahan dan pendamping PKH dalam menangani permasalahan masyarakat masih kurang baik. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih efektif.

Hambatan-hambatan dalam Penyaluran PKH pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Kenangan Baru

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kenangan Baru tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran program. Hambatan-hambatan ini mencakup ketidaksinkronan data penerima manfaat, kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam wilayah dampingan, serta permasalahan dana yang tidak tersalurkan. Setiap hambatan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini agar tujuan PKH dapat tercapai dengan optimal.

1. Ketidaksinkronan Data Penerima PKH

Ketepatan data penerima manfaat PKH menjadi faktor utama dalam keberhasilan program ini. Akurasi data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangat diperlukan agar bantuan tepat sasaran. Namun, di Kelurahan Kenangan Baru ditemukan adanya ketidaksinkronan data yang menyebabkan beberapa permasalahan dalam penyaluran bantuan. Beberapa penerima manfaat yang seharusnya sudah tidak lagi memenuhi kriteria, seperti memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik atau anak-anak mereka sudah tidak berstatus balita atau pelajar, masih tetap terdaftar sebagai penerima PKH. Sebaliknya, ada juga masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima karena keterbatasan pembaruan data. Kurangnya pembaruan data rutin menghambat validasi penerima PKH, menyebabkan keterlambatan bantuan bagi yang berhak dan tetapnya penerimaan bagi yang tidak memenuhi kriteria. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat dan memicu kecemburuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemutakhiran data yang lebih efektif dan transparan.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat KPM PKH

Partisipasi masyarakat dalam program PKH menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan program. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan sosial, tetapi juga untuk membangun kemandirian penerima manfaat melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Sayangnya, di Kelurahan Kenangan Baru, masih banyak masyarakat penerima PKH yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa KPM sering mengabaikan atau datang terlambat ke kegiatan P2K2, bahkan ada yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Mereka lebih mengutamakan pekerjaan atau urusan pribadi dibandingkan menghadiri pertemuan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya kegiatan ini dalam membantu mereka menjadi lebih mandiri. Kurangnya partisipasi KPM disebabkan oleh minimnya pemahaman manfaat program, rendahnya kesadaran akan pendidikan dan kesehatan, serta kurangnya sosialisasi dari aparat kelurahan dan pendamping PKH. Untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih efektif, edukasi proaktif, dan penerapan sanksi bagi KPM yang tidak aktif dalam kegiatan P2K2.

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Wilayah Dampingan

Sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi program PKH. Namun, di Kelurahan Kenangan Baru, jumlah pendamping PKH sangat terbatas, dengan hanya satu orang yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh penerima manfaat di wilayah tersebut. Hal ini tentunya menjadi kendala besar dalam memastikan bahwa seluruh KPM mendapatkan pendampingan yang maksimal. Pendamping PKH di Kelurahan Kenangan Baru bertugas untuk melakukan sosialisasi, monitoring, serta mendampingi KPM dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dengan jumlah penerima

manfaat yang cukup banyak, beban kerja yang ditanggung oleh satu orang pendamping menjadi sangat besar. Akibatnya, efektivitas pendampingan berkurang dan beberapa tugas tidak dapat diselesaikan dengan optimal. Kurangnya fasilitas pendukung, seperti ruang pertemuan, komputer, dan alat infokus, menghambat efektivitas kegiatan P2K2, sehingga tujuan PKH tidak tercapai secara optimal. Untuk mengatasi hal ini, perlu penambahan pendamping PKH serta penyediaan fasilitas yang memadai agar edukasi dan pemberdayaan berjalan lebih efektif.

4. Dana yang Tidak Tersalurkan

Dana PKH merupakan komponen utama dalam program ini yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Namun, salah satu hambatan yang sering terjadi dalam penyaluran PKH di Kelurahan Kenangan Baru adalah adanya dana yang tidak tersalurkan kepada penerima manfaat. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh kesalahan dalam data KPM, yang mengharuskan registrasi ulang sebelum dana dapat dicairkan. Proses registrasi ulang ini memakan waktu cukup lama, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Akibatnya, beberapa KPM tidak menerima bantuan mereka tepat waktu, bahkan ada yang tidak mendapatkan dana sama sekali pada tahap tertentu. Tidak cairnya dana bantuan berdampak negatif bagi penerima manfaat, menghambat pemenuhan kebutuhan dasar, dan menurunkan partisipasi mereka dalam kegiatan PKH. Kecewa ini berpotensi mengurangi efektivitas program yang bertujuan membangun kemandirian KPM. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem pembaruan data yang lebih efisien, transparansi mengenai keterlambatan pencairan, serta mekanisme pengaduan yang jelas agar masalah dapat segera ditindaklanjuti.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis enam indikator kinerja aparatur dalam penyaluran PKH di Kelurahan Kenangan Baru, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang telah berjalan dengan baik, seperti kuantitas pekerjaan, inisiatif, dan adaptasi aparatur dalam menghadapi perubahan. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, seperti kualitas pekerjaan dalam memastikan tepatnya sasaran penerima bantuan, kemandirian dalam menangani berbagai prosedur tanpa ketergantungan pada pegawai tertentu, serta kerja sama yang lebih baik antara kelurahan dan pendamping PKH. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam sistem verifikasi penerima manfaat, peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien, serta peningkatan koordinasi antara pihak kelurahan dan pendamping PKH untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran PKH di Kelurahan Kenangan Baru masih menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas program ini. Ketidaksinkronan data penerima manfaat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan P2K2, keterbatasan SDM dalam wilayah dampingan, serta permasalahan dana yang tidak tersalurkan menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran program. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan perbaikan dalam sistem pemutakhiran data, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap manfaat program, penambahan jumlah pendamping PKH, serta peningkatan efisiensi dalam pencairan dana. Dengan adanya langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan program PKH dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat miskin di Kelurahan Kenangan Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Auza, A. (2023). Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3378–3383. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1732>
- Hakim, A., & Pakam. (2014). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tandam Hulu Ii Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 1–20. <https://www.google.com/search?safe=strict&ei=P-mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi>

- %2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Paca
rkeling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem
- Ilmiah, J., Publik, A., Arjuna, P., Kadir, A., & Angelia, N. (2023). *Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan pada Masyarakat Desa di Desa Silumajang Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Analysis of The Performance of The Village Apparatus In Service to the Village Community In Silumajang Village Na. IX-X.* 2(1), 18–24. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.769>
- Junianto, I., Isabella, I., & Kencana, N. (2020). Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i1.1027>
- Kementerian Sosial. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Program Keluarga Harapan.*
- Kusnadi, E. . P. I. Y. . & W. N. (2020). Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. . In *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 38-49. (Vol. 3, Issue 1, pp. 38–49).
- Matondang, A. (2015). Pembinaan Aparatur Pemerintahan dalam Pelaksanaan Tugas di Bagian Umum Sekretariat Kantor Bupati. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(2), 160–174. <https://doi.org/10.31289/JPPUMA.V3I2.902.G909>
- Mubarq, M. R., Hakim, L., & Rahman. (2023). Analisis Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia Analysis of Dynamic Relationships of Central and Local Government in Management of The Covid. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 36–45.
- Mulyana, N., & Zainuddin, M. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (Kasus Pelaksanaan CSR oleh PT Pertamina UP-IV Balongan). *Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 80. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14212>
- Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan kemiskinan. *Jurnal Persektif Komunikatif*, 3(2), 91–103.
- Pratama, T. H., Purba, A., & Kusmanto, H. (2022). Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1325–1333. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1411>
- Priansa, J. D. (2014). *Perencanaan & Pengembangan SDM.* Alfabeta.
- S, B. P. (2019). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/kota 2019. In *Data dan Informasi Kemiskinan.*
- Sitepu, Y. A., Kadir, A., & Dewi, R. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salopian Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 54–61.
- Sukrianto, A., & Saharuddin, E. (2021). Strategi Pemerintah dalam Penerapan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 135–142. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.605>
- SUPRATMAN, Y. A. (2019). *Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar* (pp. 1–101).
- Tyson, S., & Jacson, T. (2010). *The Esense of Organization behaviour.* Pearson Education Asia Pte. Ltd.
- Utama, P. N., Hidayat, R., & Nazwin, A. H. (2023). Gambaran Pelayanan Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 5(2), 72–90. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v5i2.3358>
- Virgoreta, D., & Pratiwi, R. N. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(12), 1–6.
- Yuhana, K., & Kartini, T. (2020). Implementasi Kebijakan Progran Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 63–78. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v1i1.737>
- Yusuf Hidayat, Laila Azkia, M. R. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(2), 93. <https://doi.org/10.20527/padaringan.v4i2.5457>